

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini budaya merupakan salah satu elemen penting yang mencerminkan identitas suatu negara. Dalam konteks hubungan internasional, budaya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menjalankan kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>1</sup> Budaya populer atau yang dikenal dengan istilah *pop culture*, merupakan dampak dari proses globalisasi dalam aspek kebudayaan yang terlihat dari muncul dan berkembangnya berbagai bentuk budaya populer di masyarakat.<sup>2</sup> Budaya populer berperan sebagai salah satu wujud diplomasi budaya yang efektif dalam memperkenalkan identitas budaya suatu negara ke kancah global. Melalui pendekatan ini negara dapat membangun citra positif di mata dunia internasional serta memperkuat dan memperdalam hubungan antarnegara. Selain itu, *pop culture* juga menjadi instrumen strategis dalam mencapai kepentingan nasional.<sup>3</sup> Korea Selatan dan Jepang sebagai salah satu negara dengan kekuatan budaya pop terbesar di dunia telah berhasil menjadikan produk budaya mereka K-Pop dan J-Pop sebagai alat strategis untuk memperluas pengaruh nasional secara global.

<sup>1</sup> Annisa Nur Islamiyah, Nafila Maulina Priyanto, dan Ni Putu Dyana Prabhandari. "Diplomasi Budaya Jepang dan Korea Selatan di Indonesia tahun 2020: Studi Komparasi." *Jurnal Hubungan Internasional* 13, no 2 (November 2020) 257.

<sup>2</sup> Fidian Putri, Indrawati. "Diplomasi Dua Budaya: Studi Kasus Perbandingan Strategi Diplomasi Pop Culture Korea Selatan Dan Jepang Di Indonesia." *Global Insight Journal* 4, no 2 (September 2019).

<sup>3</sup> Fidian Putri, Indrawati. "Diplomasi Dua Budaya: Studi Kasus Perbandingan Strategi Diplomasi Pop Culture Korea Selatan Dan Jepang Di Indonesia." 4, no 2 (September 2019).

K-pop dan J-pop dimanfaatkan oleh Korea Selatan dan Jepang sebagai bagian dari kebijakan luar negeri berbasis budaya atau diplomasi *soft power*. Korea Selatan secara aktif menggunakan K-pop untuk membangun citra nasional, memperkuat hubungan internasional, dan meningkatkan ekspor budaya. Pemerintah mendukung hal ini melalui lembaga seperti *Korea Creative Content Agency (KOCCA)* yaitu lembaga yang mendukung, mempromosikan dan mengembangkan industri kreatif Korea. Dibantu oleh lembaga *Korean Foundation*, serta mendirikan *Korean Cultural Centers* di puluhan negara. Idola seperti BTS dan BLACKPINK juga berperan sebagai duta global dalam kampanye kemanusiaan dan promosi pariwisata.<sup>4</sup>

Di sisi lain, Jepang menjalankan strategi *Cool Japan* untuk memperkenalkan budaya pop seperti J-pop, anime, dan manga ke dunia. Namun, promosi Jepang lebih terfokus pada anime dan budaya tradisional, sedangkan J-pop masih bergantung pada pasar domestik dan kurang didukung secara global oleh pemerintah. Meski *Japan Foundation* dan program pariwisata budaya turut membantu promosi, dampaknya belum setara dengan globalisasi budaya Korea melalui K-pop.<sup>5</sup>

*Hallyu* atau *Korean Wave* adalah istilah yang dikenal publik karena penyebaran budaya Pop Korea di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.<sup>6</sup> *Korean Pop* atau K-Pop merupakan produk budaya populer dari Korea Selatan yang sangat terkenal hingga ke mancanegara. Pada sekitar tahun 1960-an *Japanese Pop* atau J-Pop mulai muncul.

<sup>4</sup> Jae-Hyeon Ahn, Seung-Pyo Oh, and Hyun-Ki Kim. “Korean pop takes off! Social media strategy of Korean entertainment industry.” *International Conference on Service Systems and Service Management* (July 2017)

<sup>5</sup> Koichi Iwabuchi. “Pop-culture diplomacy in Japan: soft power, nation branding and the question of international cultural exchange.” *International Journal of Cultural Policy* 21 (Juni 2015)

<sup>6</sup> Catherine Valenciana dan Jetie Kusmiati Kusna Pudjibudojo (2022). Korean Wave; Fenomena budaya pop Korea pada remaja milenial di Indonesia. *Jurnal Diversi* ta 8, no 2 (Desember 2022) 205-214.

Setelah itu di tahun 2012 pemerintah Jepang menerapkan kebijakan *Cool Japan initiative* yaitu adalah sebuah kebijakan dimana pemerintah Jepang berusaha menggunakan budaya populer mereka dalam penyebaran di sistem internasional.<sup>7</sup> Jepang dan Korea Selatan merupakan salah satu negara yang paling sukses dalam mempromosikan budaya populer nya dalam kebijakan luar negerinya.

Pada akhir tahun 2019 saat terjadinya penyebaran COVID-19, Virus yang cukup mematikan ini dengan cepat ikut mempengaruhi semua aspek kehidupan di setiap negara. Hampir semua sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga budaya ikut terdampak oleh pandemi COVID-19.<sup>8</sup> Dengan kata lain, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap seluruh negara di dunia. Salah satu aspek yang mengalami penurunan yang besar adalah perekonomian di tiap negara.

COVID-19 memberikan dampak yang besar dalam sektor ekonomi terhadap Korea Selatan dan Jepang. Sebelum terdampaknya dampak COVID-19 perekonomian Korea Selatan berjalan dengan stabil lalu di tahun 2020, di saat COVID-19 sudah menyebar luas, Korea Selatan mendapatkan dampak yang cukup signifikan seperti meningkatnya pengangguran dan juga ekspor korea selatan dalam perdagangan terganggu sehingga perekonomian Korea Selatan turun sebesar -0.9%.<sup>9</sup> Sedangkan Jepang yang sebelum terkenanya dampak COVID-19 perekonomian Jepang berjalan dengan lambat dan setelah munculnya COVID-19 ke Jepang, Jepang mengalami

<sup>7</sup> Syafril Alam and Ansgrasia Jenifer Nyarimun. "Musik K-Pop sebagai Alat Diplomasi dalam Soft Power Korea Selatan." *Jurnal International & Diplomacy Universitas Satya Negara Indonesia* 3, no. 1 (Desember 2017) 75–100.

<sup>8</sup>Bambang Arianto. "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia," *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 2, no 2 (Februari 2020): 106–126.

<sup>9</sup> International Monetary Fund (IMF), "Korea and the IMF" *International Monetary Fund* (April 2025) <https://www.imf.org/en/Countries/KOR>

penuruan tenaga kerja dan kehilangan jutaan turis asing yang merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional Jepang sehingga hal ini membuat perekonomian Jepang turun sebesar -4,5%.<sup>10</sup>

Setelah terdampak dari pandemi COVID-19 ke sektor ekonomi dan budaya secara global, Korea Selatan dan Jepang mengambil tindakan cepat dalam memanfaatkan budaya populer sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional seperti industri hiburan digital dan pariwisata virtual. Korea Selatan mengimplementasikan kebijakan budaya populer sebagai bagian dari *K-Content Global Strategy* yaitu strategi pemerintah untuk mempromosikan dan memperluas jangkauan industri Korea. Korea Selatan banyak mengandalkan K-Pop, drama Korea, dan film yang semakin mendominasi platform streaming global, ditambah konser daring dan fan meeting virtual yang menjaga hubungan dengan penggemar internasional.<sup>11</sup>

Sedangkan Jepang melakukan modifikasi *Cool Japan Fund* menjadi lebih aktif dengan mendukung digitalisasi anime dan konser J-pop secara daring. Jepang memaksimalkan anime, manga, J-Pop, dan mengembangkan turisme virtual berbasis budaya populer untuk mempertahankan daya tarik wisatawan. Selain itu, Jepang mengadakan festival budaya pop secara daring yang memadukan J-pop, makanan

<sup>10</sup> International Monetary Fund (IMF), “Japan and the IMF International” *International Monetary Fund* (April 2025) <https://www.imf.org/en/Countries/JPN>.

<sup>11</sup> Hye-Kyung Lee, Takashi Terui, and arin Ling-Fung Chau. “COVID-19 Crisis and Cultural Policy in East Asia: Korea, Japan, and China” *International Journal of Cultural Policy* 28, no. 4 (2022): 407–424

Jepang, dan anime dengan tujuan menarik kembali minat global dan menghidupkan sektor pariwisata budaya yang sempat redup.<sup>12</sup>

Pemerintah Korea Selatan secara aktif menjadikan budaya populer sebagai strategi inti pemulihan ekonomi pasca-pandemi dengan dukungan lembaga khusus seperti KOCCA dan intervensi langsung presiden yang menempatkan *Hallyu* bukan hanya sebagai instrumen diplomasi budaya tetapi juga sebagai salah satu tonggak pertumbuhan ekonomi nasional. Disisi lain pemerintah Jepang tidak terlalu aktif dan lebih menekankan budaya populer pada aspek simbolis melalui program seperti *Cool Japan Fund* dan *Pop Culture Diplomacy* sementara pertumbuhan industrinya lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta atau aktor non-pemerintah seperti studio anime dan penerbit manga. Dengan peran pemerintah yang hanya pendukung tambahan tanpa menjadikannya prioritas utama kebijakan ekonomi.

Peneliti tertarik untuk menganalisis perbandingan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam pemanfaatan budaya populer untuk kepentingan ekonomi nasional karena ingin memahami strategi kedua negara dalam mengoptimalkan potensi industri kreatif mereka di pasar global. Di tengah persaingan global dan tantangan ekonomi pascapandemi, pemahaman tentang strategi budaya populer yang efektif dapat membuka perspektif baru dalam studi hubungan internasional dan ekonomi politik. Penelitian ini juga penting untuk melihat bagaimana peran negara, pelaku industri kreatif, dan masyarakat saling berinteraksi dalam membentuk kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi serta citra positif di tingkat global.

---

<sup>12</sup> Mitsuo Uchida, “How Has the COVID-19 Pandemic Affected Travelers and Tourist Destinations?,” *Journal of Vaccines and Vaccination* (2021).

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Republik Korea Selatan dan Jepang sama-sama melihat peluang strategis dalam penyebaran budaya populer sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mereka pada pasca COVID-19. Korea Selatan berhasil memanfaatkan *Korean Wave (Hallyu)* sebagai alat diplomasi budaya yang berdampak langsung pada sektor ekonomi melalui peningkatan ekspor produk budaya, industri hiburan, kosmetik, hingga meningkatnya jumlah wisatawan asing dan konsumsi budaya Korea di berbagai negara. Di sisi lain, Jepang melalui strategi *Cool Japan* juga menjalankan kebijakan serupa dengan mempromosikan anime, manga, musik, dan berbagai produk kreatif untuk memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekspor budaya pop Jepang. Kedua negara melaksanakan berbagai kebijakan, program promosi, dan investasi yang terkoordinasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung industri budaya mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam penggunaan budaya populer untuk pencapaikan kepentingan ekonomi pasca COVID-19.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh peneliti yaitu “Bagaimana perbandingan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam penggunaan budaya populer untuk pencapaikan kepentingan ekonomi pasca COVID-19?”

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbandingan antara kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam memanfaatkan budaya populer sebagai alat strategis untuk mencapai kepentingan ekonomi COVID-19.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua manfaat yaitu :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam Studi Hubungan Internasional dalam menganalisis perbandingan kebijakan dalam penggunaan budaya populer Korea Selatan dan Jepang untuk mencapai kepentingan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, pihak industri kreatif, dan sektor swasta dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk memanfaatkan budaya populer sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.

## 1.6 Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan beberapa referensi yang relevan untuk membantu memperluas ruang lingkup penelitian ini. Beberapa referensi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu :

Studi Pustaka pertama yang di ambil oleh peneliti adalah “*Process Tracing of Pop Culture, Public Diplomacy, and Soft Power: A Comparative Study Between Korea*

*and Japan*” oleh Linnéa Mossberg.<sup>13</sup> Penelitian ini menyajikan studi perbandingan antara Korea Selatan dan Jepang mengenai bagaimana kebijakan publik mereka dalam memanfaatkan budaya populer dapat menciptakan soft power yang mendukung kepentingan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan *process tracing* dan kerangka analitik yang memfokuskan pada tiga mekanisme utama dalam diplomasi publik yaitu yang pertama konten dan pesan, kedua keterlibatan sipil dan masyarakat madani, dan yang ke tiga investasi finansial dan kebijakan pendukung.

Dalam kasus Korea Selatan, ditemukan bahwa keberhasilan *Hallyu (Korean Wave)* sebagai alat diplomasi budaya bukan semata-mata hasil dari kebijakan negara, melainkan kombinasi antara partisipasi masyarakat sipil, dukungan institusional yang tepat sasaran, serta pertumbuhan organik dari industri hiburan. Negara hadir sebagai fasilitator bukan kreator melalui lembaga seperti *Korea Foundation* dan KOCCA, dengan menjaga jarak yang sehat dari industri budaya untuk mempertahankan otentisitas dan daya tarik alami kontennya. Sebaliknya, Jepang menghadapi kesulitan dalam menjadikan kebijakan budaya populer sebagai alat strategis ekonomi. Meskipun memiliki potensi budaya besar seperti anime, manga, dan ikon seperti Hello Kitty, pendekatan kebijakan Jepang dianggap terlalu satu arah dan kurang melibatkan dialog dua arah dengan publik asing. Strategi *“Cool Japan”* yang diluncurkan sebagai respons terhadap krisis citra pasca-Perang Dunia II justru banyak dikritik karena minimnya

---

<sup>13</sup> Linnéa Mossberg, “Process Tracing of Pop Culture, Public Diplomacy, and Soft Power: A Comparative Study Between Korea and Japan” *University of Gothenburg* (April 2025).

keterlibatan masyarakat dan kurang efektif dalam menciptakan resonansi internasional yang berkelanjutan.

Penelitian ini dijadikan studi pustaka karena memberikan kerangka evaluatif yang jelas tentang kondisi dan faktor apa yang membuat pemanfaatan budaya populer menjadi efektif dalam mendukung kekuatan nasional suatu negara. Terutama dalam konteks Korea Selatan yang berhasil mengintegrasikan budaya populer sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi kreatif dan daya tarik diplomatik, dibandingkan Jepang yang cenderung stagnan meskipun memiliki warisan budaya populer yang kuat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memahami perbedaan kebijakan dan efeknya terhadap penciptaan nilai ekonomi dari sektor budaya.

Studi pustaka yang ke dua yaitu “*The COVID-19 crisis and ‘critical juncture’ in cultural policy: a comparative analysis of cultural policy responses in South Korea, Japan and China*” oleh Hye-Kyung Lee, Karin Ling-Fung Chau dan Takao Terui.<sup>14</sup>

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pandemi COVID-19 menjadi titik balik kebijakan budaya di Korea Selatan dan Jepang, yang berimplikasi besar terhadap arah baru kebijakan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Korea Selatan memperlihatkan pola *policy acceleration*, yaitu mempercepat kebijakan yang sudah ada dengan menekankan aspek kesejahteraan seniman dan pekerja budaya. Pemerintahnya cepat tanggap dengan memberikan bantuan finansial, memperluas

---

<sup>14</sup> Hye-Kyung Lee, Karin Ling-Fung Chau, and Takao Terui, “The COVID-19 Crisis and ‘Critical Juncture’ in Cultural Policy: A Comparative Analysis of Cultural Policy Responses in South Korea, Japan and China,” *International Journal of Cultural Policy* 28, no. 2 (2022): 145–165

program jaminan sosial seperti asuransi ketenagakerjaan seniman, dan membuka lapangan kerja berbasis budaya.

Sementara itu, Jepang menunjukkan tanda-tanda *policy movement*, yaitu adanya desakan perubahan struktural dalam kebijakan budaya yang selama ini bersifat liberal dan non-intervensi. Pandemi telah memicu seniman dan komunitas budaya untuk bersatu dalam kampanye seperti “#We-Need-Culture” guna menuntut intervensi negara dalam penyelamatan sektor budaya. Meski pemerintah melalui *Agency for Cultural Affairs* akhirnya merespons dengan paket bantuan yang cukup besar dan struktur kebijakan belum mengalami perubahan mendalam.

Penulis memilih artikel ini sebagai studi pustaka karena penelitian ini menyoroti bahwa kebijakan budaya bukan sekadar respons terhadap krisis, melainkan refleksi dari orientasi negara terhadap budaya sebagai aset ekonomi dan sosial. Korea Selatan lebih siap secara kelembagaan karena sebelumnya sudah membangun institusi budaya seperti *Korea Artist Welfare Foundation*, sementara Jepang masih dalam tahap transisi menuju kebijakan yang lebih terstruktur. Hal ini memperkuat tema utama skripsi bahwa pemanfaatan budaya populer tidak terlepas dari konteks kebijakan dan peran negara dalam mengarahkan potensi ekonomi budaya secara strategis.

Studi pustaka ke tiga yaitu “*Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Korean Pop Culture sebagai Instrumen Politik Luar Negeri Korea Selatan*”

oleh Maharani Putri Endrayana dan Muhammad Haizul Falah.<sup>15</sup> Artikel ini membahas bagaimana Korea Selatan menggunakan budaya populer, khususnya *Korean Pop Culture* (K-Pop), sebagai bagian dari kebijakan luar negeri dan alat diplomasi untuk memperkuat posisi negaranya secara global. Penulis menjelaskan bahwa pemerintah Korea Selatan secara aktif melibatkan K-Pop dalam strategi soft power yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi, budaya, dan hubungan internasional. Dukungan terhadap industri budaya dilakukan melalui kebijakan yang sistematis, termasuk promosi melalui lembaga pemerintah seperti *Korea Foundation*, dan penguatan identitas budaya Korea melalui ekspor konten hiburan.

Studi ini juga menyoroti bahwa popularitas K-Pop tidak hanya memperluas pengaruh budaya Korea di dunia internasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan devisa dari pariwisata, ekspor konten budaya, serta meningkatnya investasi dan kerja sama bilateral. K-Pop dianggap sebagai simbol kekuatan lunak Korea Selatan yang efektif dalam membangun citra negara dan membuka peluang kerja sama ekonomi dengan berbagai negara, termasuk Indonesia.

Penelitian ini relevan dijadikan sebagai studi pustaka karena memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara kebijakan luar negeri Korea Selatan dan pemanfaatan budaya populer sebagai alat untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional. Artikel ini memperkuat argumen bahwa budaya populer dapat dijadikan instrumen strategis dalam diplomasi luar negeri untuk mendukung pertumbuhan

---

<sup>15</sup> Maharani Putri Endrayana dan Muhammad Haizul Falah, “Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Korean Pop Culture sebagai Instrumen Politik Luar Negeri Korea Selatan,” *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik* 2, no. 4 (Juni 2025): 959–964.

ekonomi. Hasil dari penelitian ini bisa berguna bagi peneliti untuk membandingkan pendekatan Korea Selatan dengan negara lain, seperti Jepang, dalam konteks penggunaan budaya populer sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri berbasis ekonomi.

Studi pustaka yang ke empat yaitu berjudul “*Diplomasi Publik Dan Budaya Jepang Melalui Instrumen Soft Power Diplomacy*” oleh Amelia Pratiwi.<sup>16</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa Jepang secara aktif menggunakan elemen-elemen budaya populernya seperti anime, manga, J-Pop, dan festival budaya Jepang sebagai instrumen diplomasi luar negeri yang bertujuan membangun pengaruh secara damai dan tidak mengancam. Pendekatan ini dipadukan dengan berbagai program seperti beasiswa, pertukaran pelajar, promosi bahasa Jepang, dan dukungan lembaga seperti *Japan Foundation*, yang berperan penting dalam menjalankan kebijakan budaya luar negeri Jepang.

Penelitian ini menyoroti bahwa strategi diplomasi budaya Jepang tidak hanya berfungsi untuk kepentingan sosial dan hubungan bilateral, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan ekspor budaya, industri kreatif, dan pariwisata. Jepang berupaya menyesuaikan citra globalnya sebagai negara maju yang ramah, kreatif, dan berbudaya, guna memperluas kerja sama ekonomi.

Penelitian ini bisa berguna bagi peneliti karena memberikan landasan yang kuat mengenai bagaimana budaya populer digunakan dalam kebijakan luar negeri Jepang

---

<sup>16</sup> Amelia Pratiwi, “Diplomasi Publik dan Budaya Jepang melalui Instrumen Soft Power Diplomacy,” *Jurnal Hubungan Internasional*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Oktober 2021), 2–7.

sebagai strategi *soft power* yang mendukung kepentingan nasional, termasuk dalam sektor perekonomian. Penelitian ini juga bisa berguna untuk membantu peneliti membandingkan pendekatan Jepang dengan Korea Selatan dalam memanfaatkan budaya sebagai instrumen diplomasi ekonomi.

Studi pustaka yang terakhir yaitu berjudul “*Penyebaran Budaya Korea Selatan di Tengah Masyarakat Dunia*” oleh Nanda Yulfi Chairunnisa.<sup>17</sup> Artikel ini membahas bagaimana budaya populer Korea Selatan berkembang dan menyebar ke berbagai belahan dunia, serta dampaknya terhadap persepsi dan penerimaan masyarakat global. Fokus utamanya adalah pada fenomena *Hallyu* atau *Korean Wave* yang mencakup penyebaran K-Pop, drama Korea, fashion, kuliner, hingga gaya hidup Korea. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan penyebaran budaya ini bukan hanya karena kualitas hiburannya, tetapi juga karena dukungan kuat dari pemerintah Korea Selatan, yang secara aktif menjadikan budaya populer sebagai bagian dari strategi *soft power* dalam hubungan internasional.

Artikel ini menjelaskan bahwa penyebaran budaya Korea Selatan berhasil membentuk citra negara yang modern, kreatif, dan terbuka, yang pada akhirnya mendukung berbagai tujuan nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata, ekspor konten budaya, dan kerja sama bilateral. Budaya populer tidak hanya menjadi alat hiburan, tetapi juga jembatan diplomasi yang memperluas pengaruh Korea di dunia.

---

<sup>17</sup> Nanda Yulfi Chairunnisa, “Penyebaran Budaya Korea Selatan di Tengah Masyarakat Dunia,” *Jurnal Hubungan Internasional*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2021), 2–8.

Artikel ini dipilih oleh peneliti untuk menjadi studi pustaka karena memberikan gambaran menyeluruh tentang peran budaya populer dalam diplomasi dan penguatan kepentingan nasional, khususnya dari sisi strategi penyebaran dan dukungan kebijakan negara. Penjelasan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana Korea Selatan secara sistematis membangun kekuatan lunak budaya demi mendukung sektor ekonomi dan memperluas pengaruh globalnya yang dapat dibandingkan dengan pendekatan budaya populer Jepang dalam konteks penelitian komparatif.

Namun, hingga penelitian ini dilakukan, belum ditemukan studi yang secara khusus membandingkan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam memanfaatkan budaya populer untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur Ilmu Hubungan Internasional, khususnya terkait peran budaya sebagai instrumen kebijakan negara dalam sektor perekonomian.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Comparative Foreign Policy

Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Comparative Foreign Policy* (CFP). Menurut Ryan K. Beasley dalam *Comparative Foreign Policy* kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai segala tindakan dan perilaku yang diambil oleh suatu negara dalam menjalani hubungan dengan semua pihak di luar teritorinya, baik itu aktor negara maupun aktor non-negara.<sup>18</sup> Beasley menekankan bahwa

---

<sup>18</sup> Ryan K Beasley et al., *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior* Second Edition (Los Angeles: SAGE Publications, 2013).

kebijakan luar negeri negara tidak bisa dipahami hanya dari kondisi internasional, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor domestik dan aktor individu.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini Comparative Foreign Policy dapat diterapkan secara efektif untuk menganalisis perbandingan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam pemanfaatan budaya populer demi mencapai kepentingan nasional di sektor perekonomian. Teori yang dipakai yaitu dari Beasley karena teori CFP Beasley memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menjelaskan berbagai cara yang dilakukan Korea Selatan dan Jepang dalam menjadikan budaya populer sebagai instrumen ekonomi nasional.

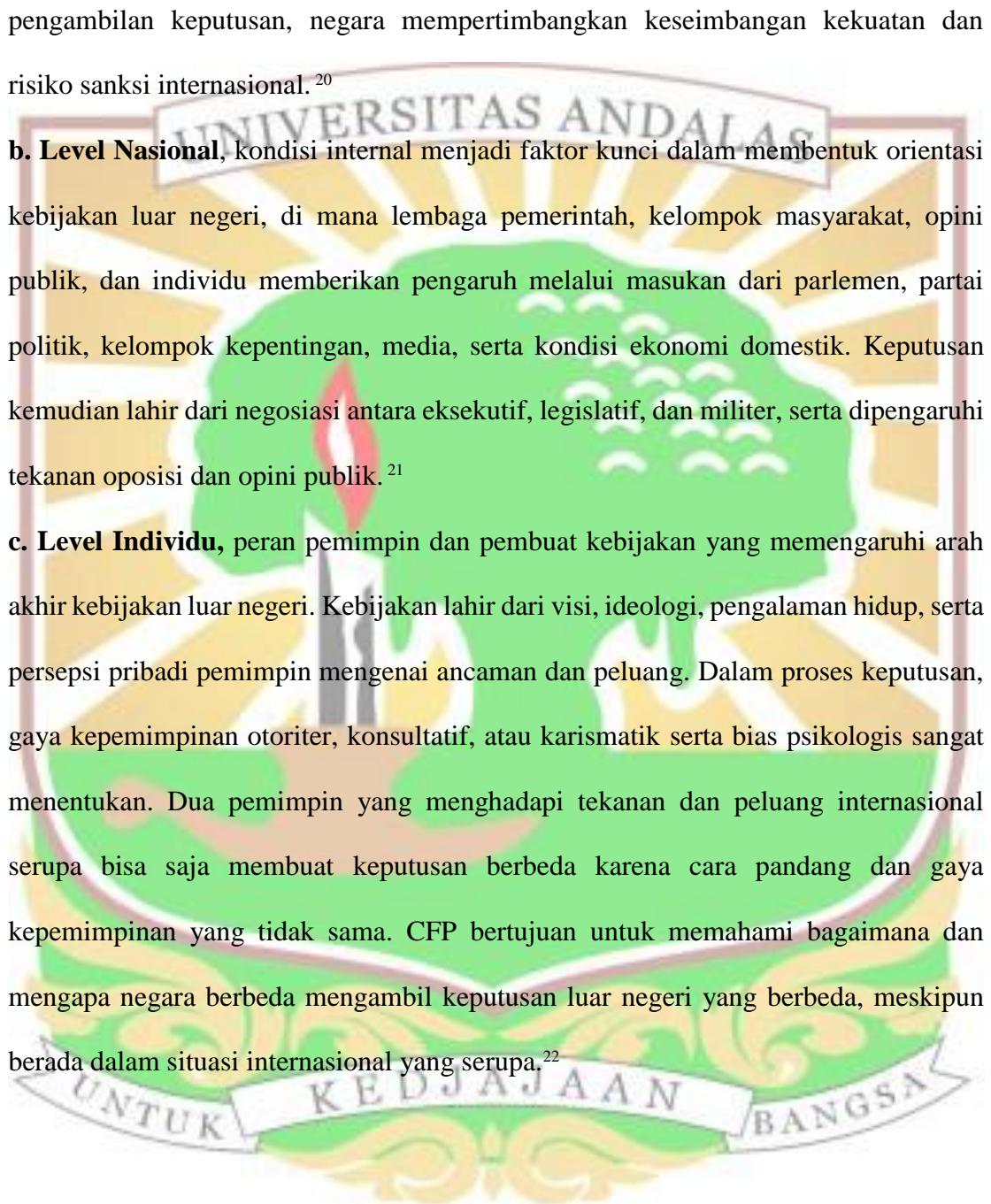
### 1.7.2 Skema Analisis

Peneliti menggunakan teori *Comparative Foreign Policy* (CFP) dari Ryan K. Beasley untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam memanfaatkan budaya populer untuk kepentingan ekonomi pasca COVID-19. Teori CFP membagi analisis ke dalam tiga level atau tingkat utama yaitu individu, nasional, dan sistem internasional.

**a. Level Internasional**, berfokus pada lingkungan yang mempengaruhi ke negara. Sistem internasional menciptakan peluang sekaligus batasan bagi negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi ancaman global seperti perang, terorisme, atau krisis ekonomi, serta peluang kerja sama melalui aliansi, perdagangan, dan diplomasi multilateral. Dalam proses

---

<sup>19</sup> Ryan Kent Beasley “Comparative Foreign Policy Analysis,” *Jurnal Foreign Policy Analysis*, Oxford University (2017), 1–14.



pengambilan keputusan, negara mempertimbangkan keseimbangan kekuatan dan risiko sanksi internasional.<sup>20</sup>

**b. Level Nasional**, kondisi internal menjadi faktor kunci dalam membentuk orientasi kebijakan luar negeri, di mana lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, opini publik, dan individu memberikan pengaruh melalui masukan dari parlemen, partai politik, kelompok kepentingan, media, serta kondisi ekonomi domestik. Keputusan kemudian lahir dari negosiasi antara eksekutif, legislatif, dan militer, serta dipengaruhi tekanan oposisi dan opini publik.<sup>21</sup>

**c. Level Individu**, peran pemimpin dan pembuat kebijakan yang memengaruhi arah akhir kebijakan luar negeri. Kebijakan lahir dari visi, ideologi, pengalaman hidup, serta persepsi pribadi pemimpin mengenai ancaman dan peluang. Dalam proses keputusan, gaya kepemimpinan otoriter, konsultatif, atau karismatik serta bias psikologis sangat menentukan. Dua pemimpin yang menghadapi tekanan dan peluang internasional serupa bisa saja membuat keputusan berbeda karena cara pandang dan gaya kepemimpinan yang tidak sama. CFP bertujuan untuk memahami bagaimana dan mengapa negara berbeda mengambil keputusan luar negeri yang berbeda, meskipun berada dalam situasi internasional yang serupa.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ryan Kent Beasley “Comparative Foreign Policy Analysis,” *Jurnal Foreign Policy Analysis*, Oxford University (2017), 1–14.

<sup>21</sup> Ryan Kent Beasley “Comparative Foreign Policy Analysis,” *Jurnal Foreign Policy Analysis*, Oxford University (2017), 1–14.

<sup>22</sup> Ryan Kent Beasley “Comparative Foreign Policy Analysis,” *Jurnal Foreign Policy Analysis*, Oxford University (2017), 1–14.

## 1.8 Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang digunakan pada kondisi alamiah, teknik pengumpulan data pada metode ini dilakukan secara triangulasi (gabungan dari berbagai sumber) dan analisis data bersifat induktif.<sup>23</sup> Dengan kata lain, semakin dalam analisis semakin berkualitas hasil penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam memanfaatkan budaya populer mereka yaitu K-pop dan J-pop untuk mencapai kepentingan nasional di bidang ekonomi.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini, penelitian menetapkan batasan waktu penelitian pada periode 2020–2024, yaitu masa pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang besar terhadap stabilitas ekonomi global. Pandemi ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, gangguan rantai pasokan, dan penurunan aktivitas perdagangan dan konsumsi di banyak negara, termasuk Korea Selatan dan Jepang. Dalam menghadapi situasi tersebut, kedua negara memperkuat pemanfaatan budaya populer yaitu K-pop dari Korea Selatan dan J-pop dari Jepang sebagai bagian dari strategi dalam peningkatan perekonomian negara. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan di

---

<sup>23</sup> Rizal Safarudin, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti, “Penelitian Kualitatif,” *Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–9694.

masing-masing negara dirancang dan diterapkan untuk memaksimalkan kontribusi budaya populer terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Dalam penelitian ini unit analisis nya yaitu kebijakan dalam budaya populer yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui K-pop dan Jepang melalui J-pop yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negaranya pasca COVID-19. Lalu untuk unit eksplanasinya yaitu peran budaya populer dalam membentuk citra positif negara dan pengaruhnya terhadap konsumsi produk budaya, pertumbuhan sektor pariwisata, serta aktivitas ekonomi lintas negara yang berkaitan dengan budaya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedua negara memanfaatkan budaya populer secara strategis dalam meningkatkan pendapatan melalui sektor-sektor ekonomi yang didorong oleh popularitas budaya masing-masing.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perbandingan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam pemanfaatan budaya populer, khususnya K-Pop dan J-Pop sebagai instrumen untuk mendukung tercapainya kepentingan nasional di sektor perekonomian. Sumber-sumber yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah seperti KBS World dan MOFA of Japan, dan

juga publikasi resmi organisasi internasional seperti IMF, United Nations Indonesia, OECD, UNESCO dan yang berkaitan dengan perbandingan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam pemanfaatan budaya populer untuk mendukung tercapainya kepentingan ekonomi pasca COVID-19. Untuk sumber yang menggunakan bahasa asing akan diterjemahkan ke bahasa Inggris terlebih dahulu, lalu ke bahasa Indonesia.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Data yang terkumpul selanjutnya akan dikategorikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan yang muncul di antara elemen-elemen kebijakan budaya populer yang diterapkan oleh Korea Selatan dan Jepang. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditentukan kemudian disusun dan dianalisis guna menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

Dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak menggunakan urutan yang kaku, melainkan fleksibel sesuai dengan ketersediaan dan relevansi sumber. Informasi dapat diperoleh secara bersamaan dari berbagai kasus dan praktik kebijakan budaya populer yang dilakukan oleh kedua negara. Misalnya, informasi mengenai kebijakan Korea Selatan dalam mempromosikan K-Pop melalui lembaga seperti *Korea Creative Content Agency* (KOCCA), dan kebijakan Jepang melalui inisiatif *Cool Japan Strategy*. Data juga mencakup aspek dukungan pemerintah terhadap ekspor konten

---

<sup>24</sup> Catherine Marshall dan Gretchen Boger Rossman, “Designing Qualitative Research” Sage Publications, California, 1999, hal. 150.

budaya, peran swasta, serta keterlibatan media dalam proses branding nasional. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teori *Comparative Foreign Policy*, yang menekankan pentingnya membandingkan faktor internal dan eksternal, dan pengaruh pemimpin dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, analisis ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kedua negara menggunakan budaya populer sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang mendukung kepentingan ekonomi nasional. Setelah seluruh proses analisis selesai, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dari perbandingan kedua negara.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II SITUASI EKONOMI KOREA SELATAN DAN JEPANG PASCA COVID-19**

Bab ini akan membahas secara umum mengenai situasi ekonomi Korea Selatan dan Jepang pasca COVID-19. Bab ini menjadi dasar untuk memahami mengapa budaya populer dijadikan strategi penting oleh Korea Selatan dan Jepang dalam upaya pemulihan ekonomi nasional mereka.

### **BAB III KEBIJAKAN KOREA SELATAN DAN JEPANG DALAM PEMANFAATAN BUDAYA POPULER UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL PASCA COVID-19**

Bab ini akan menjelaskan secara khusus mengenai kebijakan yang diambil oleh Korea Selatan dan Jepang dalam mendukung industri budaya populer masing-masing terutama K-Pop dan J-Pop. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana kebijakan ini dikelola untuk mendukung pencitraan nasional, mendorong sektor industri hiburan, dan ekspor jasa kreatif.

### **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ANTARA KOREA SELATAN DAN JEPANG DALAM PEMANFAATAN BUDAYA POPULER UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL PASCA COVID-19**

19

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian, yang memuat hasil analisis perbandingan antara kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam menggunakan budaya populer untuk mendukung kepentingan nasional di sektor ekonomi pasca COVID-19.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini membahas tentang hasil-hasil temuan dari seluruh bab, menyimpulkan hasil penelitian mengenai perbandingan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam menggunakan budaya populer untuk mencapai kepentingan nasional di sektor perekonomian pasca COVID-19. Selain itu, peneliti akan memberikan saran

atau rekomendasi untuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penelitian ini.

